



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN GOWA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, Januari 2023  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN,**

**Drs. Arifuddin Saeni**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196512311995121009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	4
I.2 Landasan Hukum .....	6
I.3 Maksud dan Tujuan .....	8
I.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	17
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	23
3.3 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	30
5.2 Rencana Tindak Lanjut .....	30

### **Lampiran :**

- *Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023;*
- *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa;*
- *Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024;*
- *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.*

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan

sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah- langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

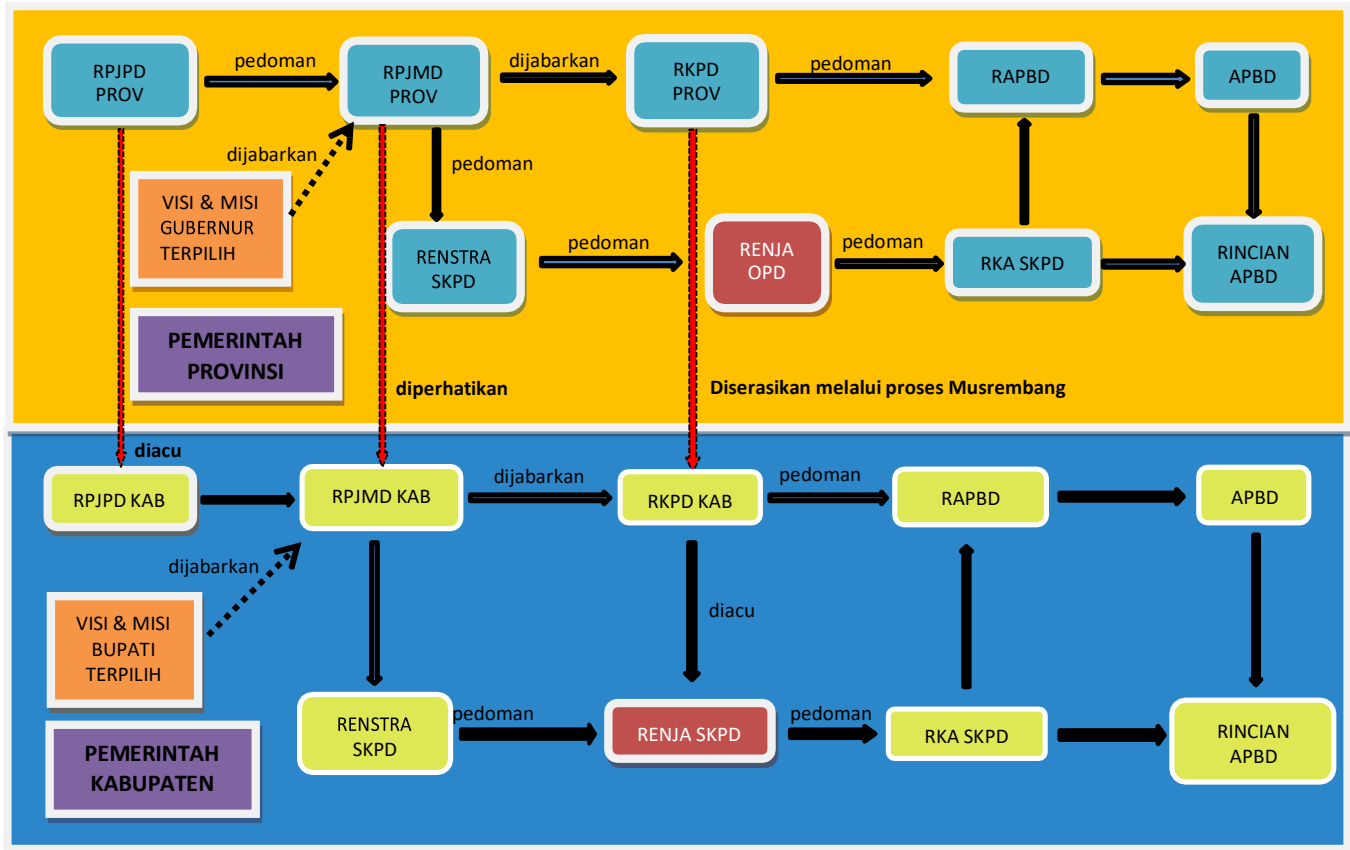
Prinsip – prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Seperti yang terlihat dibawah ini :

**Bagan I.1**  
**Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



## I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;



4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
5. Menyelaraskan program dengan penganggaran.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;
3. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;
4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu :
  - Masukan
  - Keluaran
  - Hasil

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

#### **I.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### I.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

#### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- III.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
    - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Merealisasikan pencapai target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam menyusun Program Kegiatan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian selain mempunyai tugas dan fungsi sebagai SKPD juga melakukan fungsi sebagai Bendahara Umum.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp. **10.547.125.381,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **8.291.302.071,00** sebagaimana yang terdiri dari 5 (Lima ) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub.kegiatan. Reviuw Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang masih mengacu pada RENSTRA periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Table TC-29**

**Tabel T-C.29.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			tidak perlu diisi						
	<b>TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS IT</b>	<b>INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</b>								
	Sasaran Program Meningkatnya layanan penunjang SKPD	Persentase layanan penunjang yang dilaksanakan								
	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%							
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	100%							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun	15		3	3	100%	9	12	80%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10		2	2	100%	6	8	80%



					Dokumen RKA-SKPD								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		1	1	100%	3	4	80%
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	195		38	38	100%	39	77	39%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	35		7	7	100%	21	28	80%
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	60		12	12	100%	36	48	80%
					Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5		1	1	100%	3	4	80%
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%							

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35		7	7	100%	10	17	49%
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10		2	2	100%	6	8	80%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10		2	2	100%	6	8	80%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15		3	3	100%	9	12	80%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian</b>	100%							
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	265		53	53	100%	53	106	40%
				Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah</b>	0							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		0	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	100%							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20		4	4	100%	4	8	40%

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	195		39	39	100%	117	156	80%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5		1	1	100%	3	4	0,8
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%							
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		2	1	50%	3	4	67%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	50		30	30	100%	30	60	120%
				<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/m itra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah								
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	80		16	16	100%	16	32	40%

					Informasi Publik									
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	75		15	15	100%	15	30	40%
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	45		9	9	100%	27	36	80%
					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi								
					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain								
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10		2	2	100%	6	8	80%
					Daerah Kabupaten Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo								
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	15		3	3	100%	9	12	80%

				Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	23		23	23	100%	23	23	100%
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50		10	10	100%	10	20	40%
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	45		9	9	100%	27	36	80%
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1		1	0	0	1	1	100%
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS								

				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	5		1	1	100%	3	4	80%
				Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5		1	1	100%	3	4	80%
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa</b>								
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	<b>Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi</b>								
				Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1		1	0	0	1	1	100%
				Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1		1	0	0	1	1	100%

				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1		1	1	100%	1	2	200%
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah								
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1		1	1	100%	1	2	200%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016–2021. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DISKOMINFO,SP sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2022 sebagai berikut :



**Tabel. TC-30**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU Renstra OPD	Permendagri 59 /2021 mulai Hal 155	Permendagri 18/2020 Hal 177 s.d Hal 291									
			Permendagri 86/2017 Hal 206 s.d Hal 233									
1	INDIKATOR TUJUAN PD : INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK											
2	Indikator Sasaran PD : - Persentase publikasi informasi		IKK Outcome Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%			1.Meningkatkan Inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi untuk mendukung pelayanan publik
			IKK Output Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo IKK Output									2.Meningkatkan koordinasi dan pendampingan PPID Pembantu dalam memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa**

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kedepannya yakni:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
2. Masih perlunya peningkatan nilai keterbukaan Informasi publik;
3. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan;
4. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah
5. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Implementasi sistim pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE);
2. Keterbukaan Informasi publik;
3. Penyediaan Data Statistik Daerah melalui Single data ;
4. Keamanan informasi dengan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai berikut :

**Tabel. T-C-31**

Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024  
Pemerintah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<i>berdasarkan rincian belanja</i>					<i>berdasarkan rincian belanja</i>	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.432.402.284	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.140.656.204	
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Diskominfo,SP	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	4.052.344.430	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Diskominfo,SP	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	4.052.344.430	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo,SP	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	36.316.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo,SP	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	36.316.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.280.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.280.800	s.d.a
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.720.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.720.000	s.d.a
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.315.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.315.200	s.d.a
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disko minfo ,SP	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.306.916.502	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskomi nfo DIY	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.306.916.502	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3.235.606.502	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.235.606.502	s.d.a

1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.015.000	Sub Kegiatan Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.015.000	s.d.a
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	6.065.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	6.065.000	s.d.a
1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.230.000	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.230.000	s.d.a
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Disko minfo ,SP</b>	<b>Jumlah operasional administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>343.070.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Disko minfo ,SP</b>	<b>Jumlah operasional administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>343.070.000</b>	<b>Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.244.400	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.244.400	s.d.a
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.154.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.154.000	s.d.a
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	27.019.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	27.019.600	s.d.a
1.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 jenis	313.652.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	313.652.000	s.d.a
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Disko minfo ,SP</b>	<b>Jumlah administrsai Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>62.250.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>	<b>Jumlah administrsai Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>62.250.000</b>	<b>Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan</b>
1.4.4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	62.250.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	62.250.000	s.d.a
1.5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disko minfo ,SP</b>	<b>Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor</b>	<b>100%</b>	<b>55.307.934</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskominfo</b>	<b>Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor</b>	<b>100%</b>	<b>55.307.934</b>	<b>Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis laporan	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis laporan	0	s.d.a

1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disko minfo,SP	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	140.489.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskomi info	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	140.489.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.6.1	Sub Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 jenis	108.799.000	Sub Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 jenis	108.799.000	s.d.a
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	16.490.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	16.490.000	s.d.a
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.200.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.200.000	s.d.a
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disko minfo,SP	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	163.302.928	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	163.302.928	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
1.7.1	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 unit	52.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 unit	52.000.000	s.d.a
1.7.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	111.302.928	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	111.302.928	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	80%	2.166.086.080	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	2.166.086.080	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Propinsi	Kab. Gowa	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	2.166.086.080	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	2.166.086.080	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
2.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	281.488.800	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	21 program siaran	281.488.800	s.d.a
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1.879.367.280	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	15 Media,	1.879.367.280	s.d.a
2.1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5.230.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Kelompok	5.230.000	s.d.a
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	2.223.033.200	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	2.223.033.200	

3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Gowa	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100%	2.000.166.604	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100%	2.000.166.604	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2.000.166.604	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Koneksi Internet	2.000.166.604	s.d.a
3.2	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Gowa	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	100%	2.184.454.970	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	100%	2.184.454.970	s.d.a
3.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	418.245.220	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 jenis	418.245.220	s.d.a
3.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	38.543.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 orang	38.543.000	s.d.a
3.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	46.677.400	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 orang	46.677.400	s.d.a
3.2.4	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	264.792.900	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	264.792.900	s.d.a
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistim Komunikasi intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistim Komunikasi intra Pemerintah Daerah	100%	1.416.196.450	Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistim Komunikasi intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistim Komunikasi intra Pemerintah Daerah	100%	1.416.196.450	
B	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG STATISTIK				2.289.500.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	13.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	13.250.000	



4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	100%	13.250.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS		13.250.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	6.085.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 Dokumen	6.085.000	s.d.a
4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	7.165.000	Sun Kekuatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	7.165.000	s.d.a
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa	100%	16.100.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terlaksananya pengamanan informasi dilingkup Pemkab Gowa	100%	41.100.200	
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Kab. Gowa	Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi	100%	9.295.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota		Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi	100%	9.295.000	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
5.1.1	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	25.000.000	s.d.a
5.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	9.295.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Aplikasi 46 Kelurahan pelaksanaan Indeks TTE	9.295.000	s.d.a
5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah		6.805.200	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gowa	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah		6.805.200	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan
5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat daerah	6.805.200	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1210 pucuk berita/dokumen	6.805.200	s.d.a

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi Informatika Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

**Tabel TC-32**

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah:.....

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Usulan Masyarakat dari Musrenbang Desa/Kel	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
2	Usulan Masyarakat Hibah	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
3	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
4	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				
5	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Program.....				
		Kegitan.....				
		Sub Kegiatan.....				

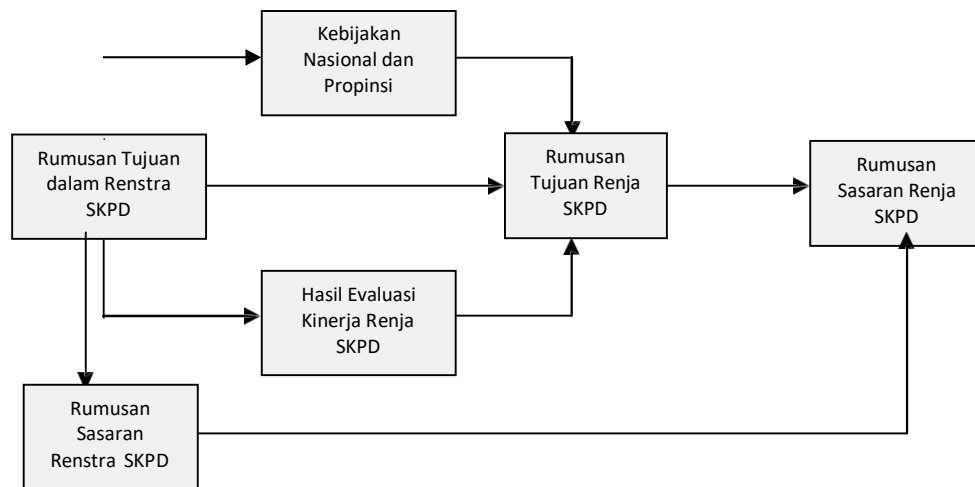
## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

**Bagan III.1**

#### PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN



#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan

yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 – 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak

anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

**2. *Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.***

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

**3. *Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.***

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

**4. *Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.***

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka peran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Komunikasi Informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi Informatika;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Komunikasi Informatika, dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu, ***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.***

Dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di periode tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Bidang Komunikasi Informatika akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mendukung pencapaian misi kepala Daerah adalah sebagai berikut :

***“Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien”.***

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”***

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pada Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024, program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dengan 32 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:  
Kegiatan :



1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ◆ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - ◆ Pengadaan Aset tak Berwujud
  - 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - ◆ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
      - ◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan :
      - ◆ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
      - ◆ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
      - ◆ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Sistim Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Kegiatan : Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan
    - ◆ Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
    - ◆ Penyelenggaraan Sistim Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - ◆ Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik
    - ◆ Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistim Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas
    - ◆ Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan
    - ◆ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
    - ◆ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan
    - ◆ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
  - Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan
  - ◆ Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 sesuai dengan Rancangan awal RKPD , dapat dilihat pada table berikut :

**Table 3.3**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Indikator Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya layanan penunjang SKPD</b>	<b>Persentase layanan penunjang yang dilaksanakan</b>	<b>Dinas Kominfo,Statistik Persandian</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 10.432.402.280</b>			<b>100%</b>	
1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja	Jumlah Dok. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yg dihasilkan	Dinas Kominfo,Statistik Persandian	6 Dokumen	Rp36.316.000	APB D/DA U	6 Dokumen	
1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	3 Dokumen	Rp13.280.800	APB D/DA U	3 Dokumen
1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tertelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	1 Dokumen	Rp14.720.000	APB D/DA U	1 Dokumen

	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	2 laporan	Rp8.315.200	APB D/DA U		2 dokumen
	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	58 Dokumen/ Laporan	Rp3.306.916.502	APB D/DA U		58 Dokumen/ Laporan
	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam Wilayah Negara Indonesia	Orang/bulan	Rp3.235.606.502	APB D/DA U		38 ASN
	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	Dokumen	Rp60.015.000	APB D/DA U		Dokumen
	1	1.02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	terkoordinasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo, Statistik Persandian	Laporan	Rp6.065.000	APB D/DA U		Laporan
	1	1.02	8	Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Tersusunnya pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp5.230.000	APB D/DA U		Dokumen

	1	.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	14 Jenis	Rp343.070.000	APB D/DA U		14 Jenis
	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	paket	Rp1.244.400	APB D/DA U		paket
	1	1.0	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	paket	Rp1.154.000	APB D/DA U		paket
	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Paket	Rp27.019.600	APB D/DA U		paket
	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo,Statistik Persandian	Laporan	Rp313.652.000			Laporan
	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian		Rp163.302.928			

1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Unit	Rp111.302.928	APB D/DA U		Unit
1	1.07	7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Dinas Kominfo,Statistk Persandian	Unit	Rp52.000.000	APB D/DA U		Unit
1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan ad ministrasi kepegawaian	Dinas Kominfo,Statistk Persandian		Rp62.250.000			
1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Paket	Rp62.250.000	APB D/DA U		Paket
1	1.08		Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Dinas Kominfo,Statistk Persandian		0			
1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Laporan	0	APB D/DA U		Laporan
1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Gowa/ Kecamatan		140.489.000,-			
1	1.08	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Gowa	Unit	108.799.000,-	APB D/DA U		4 unit



				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
1	1.08	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Gowa/ Kecamatan	Unit	16.490.000	APB D/DA U		39 unit
1	1.08	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gowa	Unit	15.200.000,-	APB D/DA U		Unit
16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gowa	100%				100%
16	2	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	Kab. Gowa		Rp. 2.166.086.080			
16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Gowa/Kec.	Dokumen	Rp1.879.367.280	APB D/DA U		Dokumen
16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Se-Kab.Gowa	Dokumen	Rp281.488.800	APB D/DA U		Dokumen

16	2	1.01	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Gowa/Kec.	Dokumen	Rp5.230.000	APB D/DA U		Dokumen
16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	OPD dan Camat se-Kabupaten Gowa	100%				100%
16	3	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	<b>Tersedianya layanan publik secara online dan terintegrasi</b>	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	Kab. Gowa		Rp. 2.000.166.600			
16	3	1.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Unit	Rp. 2.000.166.600	APB D/DA U		Unit
16	3	1.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya layanan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	Kab. Gowa		Rp2.184.454.970			
16	3	1.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Gowa	Dokumen	Rp264.792.900	APB D/DA U		Dokumen

				Penyelenggaraan Sistim Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen sistim Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistim Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Dokumen	Rp. 1.416.196.450	APB D/DA U		Dokumen
16	3	1.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Gowa/ Kec.	Unit	Rp46.677.400	APB D/DA U		Unit
16	3	1.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Terkelolanya Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp418.245.220	APB D/DA U		Dokumen
16	3	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terkelolanya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dokumen	Rp38.543.000	APB D/DA U		Dokumen
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			Kab. Gowa					
20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya layanan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kab. Gowa	100%				100%
20	2	0.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	Kab. Gowa	100%	Rp. 13.250.000	APB D/DA U		100%

20	2	0.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Gowa	Dokumen	Rp7.165.000	APB D/DA U		Dokumen
20	2	0.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Gowa	orang	Rp6.805.200	APB D/DA U		orang
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
21	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Meningkatnya layanan persandian Untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya pengamanan informasi di lingkup Pemkab Gowa</b>	<b>Kab.Gowa/ Kecamatan</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>
21	2	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	<b>Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi</b>	Kab. Gowa		Rp9.295.000			
21	2	1.01	1	Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	ditetapkannya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi	jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kab. Gowa	Dokumen	0	APB D/DA U		Dokumen
21	2	1.01	2	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksanya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gowa	Laporan	0	APB D/DA U		Laporan

21	2	1.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kel./Desa se Kab.Gowa	Laporan	Rp9.295.000	APB D/DA U		Laporan
21	2	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	100%	Rp. 6.805.200			
21	2	1.02	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Perangkat Daerah	Rp6.805.200	APB D/DA U		Perangkat Daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabarandari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Gowa yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO, SP, maka pada Tahun 2024 rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan serta 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **10.432.402.284,00**. Seluruh anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan BPKD Tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Gowa. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif BPKD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

## Tabel T-C 33

### Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023

No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya layanan penunjang SKPD	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.316.000</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.280.800,-
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.720.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.315.200,-
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	71.310.000,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60.015.000,-
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.065.000,-
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.230.000,-
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	62.250.000,-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.250.000,-
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>343.070.000</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.244.400
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.154.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.019.600
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	313.652.000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>163.302.928,-</b>
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	111.302.928,-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	52.000.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0

No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>140.489.000,-</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	108.799.000'-
2	<b>Meningkatnya layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	16.490.000'-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	15.200.000'-
		<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	
		<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>2.166.086.080,-</b>
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.879.367.280,-
		Pelayanan Informasi Publik	281.488.800,-
3	<b>Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	5.230.000,-
		<b>Program Aplikasi Informatika</b>	
		<b>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>2.000.166.604,-</b>
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.000.166.604,-
		<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>2.184.454.970,-</b>
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	264.792.900,-
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.416.196.450,-
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	46.677.400,-
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	418.245.220,-
4	<b>Meningkatnya layanan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah</b>	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Kom	38.543.000'-
		<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	
		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>13.250.000,-</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.085.000,-
5	<b>Meningkatnya layanan persandian Untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah</b>	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	7.165.000,-



No	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	
		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	9.295.000,-
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	9.295.000,-
		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>6.805.400,-</b>
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.805.400,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.196.795.982,-</b>

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.

#### **1.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :**

Rencana Kerja Badan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaiannya.

#### **1.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini, maka rekomendasi untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Sungguminasa, Januari 2023





